

# **Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey**

**Junanto Herdiawan**

junantoherdiawan@gmail.com

## **Abstrak**

Tulisan ini hendak membahas dampak pembangunan ruang perkotaan di bawah gerak kapitalisme menurut pemikiran David Harvey. Sebagai seorang ilmuwan geografi, Harvey berpandangan bahwa pembentukan ruang perkotaan telah meningkatkan ketimpangan akibat sifat modal dalam sistem kapitalisme yang hakikatnya selalu berputar dan mencari keuntungan. Harvey berargumen bahwa pembentukan kota-kota baru telah terjadi sejak ratusan tahun lalu sebagai konsekuensi dari sifat modal yang terus berakumulasi mencari keuntungan. Rencana Pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat dianalisis dari sudut pandang teori Harvey. Rencana tersebut bertujuan mengubah arah pembangunan nasional menjadi lebih merata dan berkelanjutan serta memberikan harapan pemerataan ekonomi. Namun agar harapan tersebut menjadi kenyataan, aspek-aspek etis perlu dipertimbangkan dalam pembangunan ruang perkotaan baru. Hal ini karena menurut Harvey, sepanjang sejarah kapitalisme, pembangunan ruang perkotaan umumnya menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar dan berulangnya krisis ekonomi.

**Kata Kunci:** Kapitalisme, Ruang Perkotaan, Ketimpangan, David Harvey, Ibu Kota Negara, Kontradiksi Internal, Modal.

**Junanto Herdiawan** adalah Doktor Filsafat lulusan STF Driyarkara (2021) dengan Disertasi berjudul *“Ketimpangan Sosial Akibat Kontradiksi Internal Modal dalam Ruang Geografis menurut pandangan David Harvey: Sebuah Tinjauan Etis Terhadap Terbentuknya Ruang Perkotaan”*. Ia meraih *Master of Art (MA) in Economics* dari *Leeds University, UK* (2000), dan Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Trisakti (1994). Saat ini Junanto bekerja di Bank Indonesia.

## **Pendahuluan**

Pemerintah Republik Indonesia pada Agustus 2019, bertepatan dengan hari ulang tahun RI ke-74, mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Alasan pemindahan adalah untuk mengurangi ketimpangan, pemeratakan pembangunan, dan menumbuhkan pusat ekonomi baru, selain karena alasan daya dukung dan daya tampung Pulau Jawa yang terus berkurang. Dalam perjalanan panjangnya sebagai ibukota sekaligus pusat pertumbuhan nasional, Jakarta telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagian besar perputaran uang di Indonesia juga terpusat di Jakarta. Di satu sisi hal itu mampu mengangkat kehidupan sebagian anggota masyarakatnya, tetapi di lain sisi juga telah meminggirkan sebagian warganya dari derap pembangunan. Derasnya urbanisasi dan daya tampung kota telah memunculkan ketimpangan sosial di berbagai wilayah kota.

Sampai dasawarsa 1970-an, Jakarta dan berbagai kota besar di Asia Pasifik masih dikembangkan dengan desain bagi pengadaan apa yang disebut ‘ruang-ruang publik’. Itulah ruang-ruang terbuka bagi interaksi publik para warga, dan ruang-ruang itu sering berperan sebagai “rongga-rongga gerakan politik”.<sup>1</sup> Dalam risetnya, Mike Douglass menemukan bahwa sekitar tahun 1985 pengembangan tata-kota itu mulai berubah. Dalam proses ekonomi, kelesuan pertumbuhan ekonomi dunia yang merembet ke Asia Pasifik di awal dekade 1980-an telah mengubah target investasi bukan lagi pada sektor manufaktur, tetapi pada sektor jasa keuangan dan teknologi, *real estate*, pusat perbelanjaan modern dan *outlets* bagi pasar transnasional. Kota-kota dekade 1960-an dengan cepat menyurut ditelan bayang-bayang ambisi kota global dekade 1990-an.<sup>2</sup>

Pembangunan ekonomi Kota Jakarta sempat diwarnai dengan terjadinya penggusuran massal becak dan perkampungan-perkampungan kumuh untuk membentuk wajah metropolitan modern. Selain itu, muncul dan bertumbuhan berbagai pusat perbelanjaan modern dan pasar swalayan, menggantikan pasar-pasar tradisional. Dari sudut pandang transportasi modern, Jakarta kini memiliki *Mass Rapid Transportation* (MRT) dan sistem Lintas Rel Terpadu (LRT) yang akan terus dikembangkan hingga tahun 2024 untuk mengejar dengan modernitas dan kemajuan ibu kota di negara lain. Kota Jakarta dibentuk menjadi sebuah gambaran modernitas ibu kota dengan berdirinya pusat-pusat kantor berbagai korporasi, termasuk kantor cabang sentra finansial dari berbagai negara. Semakin pesatnya pertumbuhan Jakarta terus menarik datangnya investasi dan perputaran arus modal yang berakibat pada munculnya ketimpangan dan masalah sosial lainnya.

Pertumbuhan ekonomi spasial menunjukkan bahwa dominasi Jawa dalam pertumbuhan ekonomi masih tinggi. Basis industri pengolahan Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa,

sementara industri pengolahan berbasis Sumber Daya Alam (SDA) di Sumatera dan Kalimantan. Di Jawa, industri pengolahan menjadi andalan ekspor, antara lain adalah ekspor alas kaki dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, untuk tujuan Amerika Serikat, serta ekspor otomotif tujuan ASEAN yang terus menunjukkan perbaikan di tengah pandemi.<sup>3</sup>

Pembukaan IKN adalah salah satu cara untuk dapat membangun sebuah harapan baru tentang pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, dan pengatasan problema sosial di wilayah perkotaan, khususnya Jakarta. Menurut paparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di IKN, pemerintah akan mengembangkan sektor baru, yakni industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, bahan kimia dan produk kimia, serta energi rendah karbon. Sektor yang ada saat ini, seperti pertanian, ekowisata, pertambangan, dan perkebunan, juga tetap dikembangkan.<sup>4</sup> Bappenas memproyeksikan IKN akan mengembangkan ekonomi regional menjadi 180 miliar dollar AS dan menciptakan 4,3 hingga 4,8 juta lapangan kerja di Kaltim pada 2045.

Pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini adalah bagaimana kapitalisme menyebabkan munculnya ketidakseimbangan geografi dan bagaimana Harvey memandang terbentuknya kota-kota baru sebagai problema munculnya ketimpangan dan masalah lingkungan? Penulis akan memaparkan bagaimana sirkulasi modal dalam membentuk kota, penyerapan surplus modal, terjadinya pembangunan yang tidak seimbang secara geografis, hubungan modal, dan ketimpangan sosial serta dampaknya ke lingkungan. Selanjutnya sebagai penutup, penulis akan mengangkat analisis problema etis yang muncul dari lahirnya kota-kota baru, terutama terkait dengan pemindahan IKN.

### **Modal Bersirkulasi Membentuk Ruang Perkotaan**

David Harvey menggunakan perspektif Karl Marx dalam *Das Capital* untuk memahami hubungan antara kapitalisme dan pembentukan ruang geografis. Harvey melakukan dekonstruksi atas pemikiran Marx, khususnya pada rantai produksi komoditas, nilai guna (*use value*), nilai tukar (*exchange value*), munculnya uang, hingga menghasilkan gerak atau sirkulasi dari modal yang kemudian membentuk ruang geografis (salah satunya melalui proses urbanisasi dan pembentukan kota-kota baru). Sirkulasi modal diibaratkan Harvey seperti siklus gerakan air yang dimulai dari laut dan menguap menjadi awan, kemudian awan berarak menuju

ke daratan atau gunung dan kembali lagi ke laut setelah berubah menjadi hujan yang mengalir ke sungai.<sup>5</sup>

Pergerakan modal, menurut Harvey, persis seperti siklus air tersebut. Modal berangkat dari satu titik awal hingga kembali dan berlangsung terus menerus tanpa henti. Modal memulai diri dari modal awal (uang modal), lalu uang tersebut berubah menjadi bentuk komoditas setelah melalui proses produksi yang menghasilkan sebuah produk baru yang dapat dijual di pasar dan didistribusikan dalam berbagai bentuk dan ukuran (termasuk dibagi dalam bentuk upah, gaji, sewa, pajak, keuntungan) sebelum kemudian kembali lagi menjadi uang modal dalam bentuk awalnya. Titik berangkat yang digunakan oleh Marx untuk menggambarkan sirkulasi modal adalah produksi komoditas.<sup>6</sup>

Pada awalnya, kapitalis akan mendirikan perusahaan dan memilih teknologi yang diperlukan sebelum memulai usahanya. Selanjutnya mereka akan mengumpulkan dan mengkombinasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya, seperti tenaga buruh, modal awal, sumber daya alam, dan alat produksi lainnya, guna menghasilkan komoditas. Komoditas yang dihasilkan ini kemudian dijual oleh kapitalis ke pasar sehingga menghasilkan uang plus keuntungan (*surplus-value*). Didorong oleh hukum kekuatan kompetisi (*coercive law of competition*), kapitalis dipaksa untuk menggunakan sebagian dari *surplus-value* yang dimilikinya untuk menghasilkan lebih banyak lagi *surplus-value*. Hal yang dilakukan kapitalis selanjutnya adalah melanjutkan proses produksinya secara terus menerus, dan apabila usahanya semakin besar ia akan memperluas pabrik, menambah tenaga buruhnya, memperluas pasar, dan menambah keuntungannya. Termasuk dalam hal ini adalah modal akan bergerak melintasi wilayah geografi, membentuk kota baru, hingga mendorong urbanisasi.

Hal yang terjadi selanjutnya adalah “mantra” dari kapitalis, yaitu produksi yang dilakukan untuk produksi itu sendiri, atau akumulasi keuntungan demi akumulasi keuntungan.<sup>7</sup> Sebuah siklus yang bergerak terus menerus dan menjadi tujuan, hingga dalam suatu waktu modal menghadapi batas atau hambatan. Apabila itu terjadi, maka modal akan mengalami krisis akumulasi (atau istilah lainnya mengalami hambatan pertumbuhan karena modal gagal untuk tumbuh). Sejarah geografis dari modal banyak diwarnai oleh krisis akumulasi yang terjadi, kadang sifatnya lokal dan di waktu lain bersifat global (sebagaimana terjadi pada 1848, 1929, 1998, dan 2008).

## Proses Pembentukan Kota: Urbanisasi dan Penyerapan Surplus Modal

Apa yang menuntun jalur geografi dari krisis yang menyebar melewati batas-batas wilayah, dan bagaimana dampak lokal terkait dengan dinamika global tersebut? Harvey menyebut sebuah teori tentang ‘pembangunan geografi yang tidak seimbang’ (*uneven geographical development*) saat kita membidik dinamika geografi yang rumit dan penuh intrik dari sirkulasi modal, dan secara kontekstual, dari ruang geografi tersebut mencermati bagaimana krisis terbentuk dan menyebar.<sup>8</sup>

Produksi ruang dan tempat secara umum atau proses urbanisasi secara khusus merupakan sebuah bisnis besar kapitalisme. Membangun kota baru atau mendorong urbanisasi adalah satu cara kunci dan efektif yang dilakukan untuk menyerap surplus atau kelebihan modal dari satu wilayah ke wilayah lainnya agar modal tidak berhenti berakumulasi. Melalui proses ini, proporsi yang signifikan dari angkatan kerja global total diserap dan dipekerjakan dalam berbagai bangunan dan lingkungan. Sejumlah besar modal terkait, umumnya dimobilisasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang, disusun sejalan dengan proses pembangunan wilayah-wilayah perkotaan. Investasi yang didukung oleh pinjaman kerap menjadi episentrum dari pembentukan krisis. Hubungan antara urbanisasi, akumulasi modal, dan pembentukan krisis membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan kita dalam melihatnya.<sup>9</sup>

Saat kapitalisme menghadapi masalah penyerapan surplus modal dan pertumbuhan populasi, urbanisasi menyediakan sebuah jalan keluar untuk menyerap kelebihan surplus tersebut. Sebuah hubungan internal kemudian muncul antara surplus produksi, pertumbuhan populasi, dan urbanisasi.

Sejarah tentang hubungan antara ketiganya tersebut sangatlah menarik untuk dicermati. Harvey mengacu pada apa yang terjadi di Paris saat zaman *Second Empire*, yaitu antara 1852 hingga 1870.<sup>10</sup> Krisis ekonomi Eropa yang menghempaskan hampir seluruh negara di Eropa pada tahun 1848 adalah krisis pertama dalam sejarah yang berasal dari terjadinya surplus modal dan tenaga kerja secara bersamaan dan tampaknya saat itu tidak ada jalan keluar. Kelebihan modal tercermin dari surplus likuiditas di pasar, sementara kelebihan tenaga kerja adalah maraknya pengangguran. Krisis ini dirasakan paling berat di Paris dan akhirnya melahirkan revolusi dari kaum pekerja terhadap kaum borjuis, sebuah pemberontakan yang melihat bahwa republik sosialis adalah antidot atas keserakahan kapitalis dan ketidakseimbangan pendapatan yang mewarnai Perancis pada 1830 dan 1840. Kaum borjuis Republikan akhirnya berhasil

memenangkan revolusi tetapi gagal mengatasi krisis. Hasilnya kemudian adalah naiknya Louis-Napoleon Bonaparte, yang merancang kudeta pada 1851 dan menjadikan dirinya Kaisar Napoleon III pada 1852. Untuk menjaga kekuasaannya, kaisar melakukan tekanan politik terhadap lawan-lawannya, tetapi ia juga terkenal sebagai kaisar yang mampu mencari jalan keluar untuk menyerap surplus modal dan pengangguran yang tinggi di Paris saat itu.

Ia mengumumkan sebuah program investasi infrastruktur besar-besaran baik di dalam maupun luar negeri. Program luar negeri yang dimaksud di sini adalah pembangunan infrastruktur rel kereta api sepanjang Eropa dan turun ke Asia hingga daerah oriental di Asia Timur, termasuk juga dukungan pada pekerjaan besar seperti Terusan Suez. Di dalam negeri, yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi jaringan kereta api, membangun pelabuhan dan dermaga, sistem pengairan, dan sebagainya. Tetapi di atas itu semua adalah sebuah rekonfigurasi dari infrastruktur perkotaan terhadap kota Paris. Bonaparte memanggil Baron Haussmann ke Paris untuk memimpin pekerjaan besar mengubah wajah kota Paris pada 1853.

Namun upaya Bonaparte yang mengubah wajah kota Paris itu mengandung juga sisi gelap yang terbentuk dari penyerapan surplus melalui transformasi perkotaan mengandung apa yang dinamakan sebagai '*creative destruction*'. Tumbuh bermunculannya kota besar dan gedung-gedung pencakar langit melahirkan dimensi kelas-kelas, yang biasanya kaum miskin, tidak berpendidikan, tidak memiliki akses, biasanya adalah yang termarginalkan dari kekuatan politik, yang akhirnya menderita paling besar.<sup>11</sup>

Kekerasan juga muncul dari proses urbanisasi ini, terutama dalam proses pembangunan geografi baru di atas puing-puing kota lama, ataupun pembukaan wilayah baru. Haussmann mengusir warga-warga Paris lama dengan menggunakan kekuasaan atas nama kepentingan publik. Secara sengaja ia mengusir tempat tinggal kaum pekerja dari pusat kota Paris. Hasilnya adalah munculnya wilayah-wilayah kumuh (*slums*) baru di pinggiran yang menyimpan potensi kriminal dan kemiskinan.

### **Pembangunan yang tidak Seimbang Secara Geografis dan Produksi Ruang**

Kisah Bonaparte dan Haussman dalam pembangunan kota Paris menjadi contoh yang kerap diangkat Harvey dalam menganalisis pembangunan ruang kota. Upaya menyerap surplus modal yang dilakukan dengan proyek-proyek besar dapat berakhir pada masalah-masalah etis,

berupa ketimpangan, masalah sosial, dan lingkungan. Pada hakikatnya, modal memiliki sifat untuk berusaha berada pada lanskap geografis yang menguntungkan bagi reproduksi dirinya dan evolusi secara berkesinambungan.<sup>12</sup> Bila ada kesempatan untuk bergerak dan tumbuh di wilayah baru, modal akan melakukannya. Tidak ada yang aneh dengan itu karena semut melakukannya, berang-berang melakukannya, binatang melakukannya, jadi kenapa tidak dengan modal? Lanskap geografis dari kapitalisme, bagaimanapun juga secara terus menerus dibentuk oleh beragam tekanan teknis, ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia yang terus menerus berubah.

Harvey menggarisbawahi terdapatnya permasalahan kontradiksi internal dalam sifat modal, seperti antara modal dan buruh, modal dan alam/lingkungan, ketimpangan wilayah geografis, kemiskinan dan kekayaan, sebagaimana juga antara skala aktivitas yang berbeda, yang secara keseluruhan memberi bentuk material pada lanskap geografis.<sup>13</sup>

Lanskap geografis yang dibentuk oleh modal tidak semata-mata produk pasif yang terjadi begitu saja tanpa bentuk.<sup>14</sup> Modal bergerak ditentukan oleh aturan tertentu yang memiliki otonomi tetapi logika yang kontradiktif. Bagaimana lanskap tersebut berkembang akan mempengaruhi akumulasi modal sebagaimana juga bagaimana kontradiksi modal dan kapitalisme termanifestasi dalam ruang, tempat, dan waktu. Berkembangnya lanskap geografis modal tersebut juga memiliki peran pada pembentukan krisis. Sifat inilah yang membuat kapitalisme bisa bertahan dari zaman ke zaman. Tanpa adanya pembangunan yang tidak seimbang secara geografis dan kontradiksi yang dikandungnya, modal sejak lama telah mengeras dan pecah berkeping-keping. Inilah cara-cara utama di mana modal secara periodik menemukan dirinya kembali.

Modal dan negara memiliki peran utama dalam memproduksi ruang dan tempat yang menjadi dasar bagi aktivitas pemilik modal atau kapitalis.<sup>15</sup> Modal yang banyak akan dibutuhkan untuk membangun jalan kereta atau jalan tol, misalnya. Bagi modal, waktu adalah uang. Bergerak dari satu tempat ke tempat lain akan membutuhkan uang dan waktu. Kemampuan mengatasi tempat dan waktu inilah yang menjadi kunci bagi profitabilitas. Berbagai upaya ditempatkan pada inovasi -- baik secara teknis, organisasi, maupun logistik untuk dapat mengurangi biaya dan waktu dari pergerakan spasial antar ruang. Para pencipta teknologi baru sangat menyadari akan hal ini. Mereka berkonsentrasi banyak pada upaya-upaya untuk menghasilkan cara-cara baru mengurangi biaya atau waktu dari sirkulasi modal.

Pengurangan waktu dan biaya dapat ditempuh dalam dua cara. Pertama, memerlukan inovasi yang terus menerus di teknologi transportasi dan komunikasi. Sejarah inovasi di bawah kapitalisme (dari teknologi kanal hingga teknologi pesawat jet) sangat luar biasa. Dampaknya tergantung pada jenis modal yang bergerak. Modal dalam bentuk uang dan kredit saat ini bergerak secara seketika ke seluruh penjuru dunia. Hal ini tidak terjadi di masa lampau. Keberadaan teknologi informasi, keuangan digital, teknologi finansial, telah memungkinkan hal ini terjadi. Sebaliknya, modal dalam bentuk komoditas relatif lebih lambat pergerakannya dibanding uang. Sementara produksi, dengan pengecualian sektor transportasi, lebih sulit untuk bergerak antar ruang. Produksi biasanya tertanam di satu tempat untuk beberapa periode waktu (misalnya pabrik sepatu, pembangunan kapal, dll). Untuk produksi yang memiliki hambatan lokasi, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan, jelas tidak dapat berpindah ke tempat lain.

Biaya yang rendah di transportasi dan komunikasi dapat memfasilitasi pemecaran atau desentralisasi dari aktivitas modal melintasi ruang geografis yang luas. Semakin rendah biaya transportasi dan komunikasi menjadi faktor yang menentukan bagi modal untuk bergerak dan mengeksplorasi kesempatan mencari keuntungan dari wilayah-wilayah yang berbeda. Pembagian kerja (*divisions of labour*) dalam sebuah korporasi dapat didesentralisasi ke lokasi-lokasi yang berbeda. Memindahkan rantai produksi ke wilayah lain menjadi mungkin dan elemen monopolistik dalam kompetisi dapat dikurangi. Spesialisasi produksi yang berbeda antar wilayah menjadi penting karena perbedaan sedikit saja dalam biaya (termasuk biaya pajak) akan berpengaruh pada keuntungan yang lebih tinggi pada modal.

Ekonomi-ekonomi regional yang terpisah membentuk keterkaitan yang saling lepas dan membentuk pembangunan yang tidak seimbang secara geografis saat beberapa wilayah cenderung menjadi lebih kaya dan beberapa wilayah menjadi lebih miskin.<sup>16</sup> Harvey mengutip apa yang dikatakan oleh ekonom Gunnar Myrdal sebagai hal yang menyebabkan sirkulasi dan akumulasi.<sup>17</sup> Wilayah yang lebih maju menarik aktivitas-aktivitas baru karena gairah yang ditawarkan oleh pasar-pasar mereka. Umumnya wilayah tersebut memiliki kemudahan mendapatkan sumber daya infrastruktur sosial dan fisik dan kemudahan mendapatkan pasokan faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Sebagai hasilnya, semakin banyak modal yang tersedot masuk. Sementara di wilayah lain, yang tidak memiliki daya tarik tinggi, mereka terjebak dalam spiral depresi. Akibatnya, terjadilah ketidakseimbangan regional, ketimpangan geografis, terjadinya konsentrasi kekayaan, kekuatan, dan pengaruh.



## **Ketimpangan Kekayaan dan Kesejahteraan**

Harvey memberi catatan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan kecenderungan global yang terjadi di banyak negara. Perjuangan untuk mewujudkan distribusi kekayaan sosial tak henti-hentinya dilakukan sepanjang sejarah kapitalisme.<sup>18</sup> Hasilnya tentu berbeda-beda dari satu kota, daerah, negara, maupun grup atau komunitas dalam satu wilayah. Kekuatan atau pengaruh politik juga memiliki peran dalam distribusi pendapatan. Sepanjang sejarah, pergumulan sosial antar kelas dan etnik, seiring dengan naik turunnya ekonomi, telah memberi dampak pada pengaturan distribusi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Distribusi pendapatan di negara Nordik misalnya, sampai saat ini masih lebih egaliter dibanding dengan Amerika Serikat.<sup>19</sup> Harvey pernah mengatakan bahwa ia lebih cenderung pada struktur egaliter sosial dibandingkan dengan struktur yang sekarang ada di sistem perkotaan AS dan Inggris yang “menyembunyikan” realita terus meningkatnya ketimpangan sosial.<sup>20</sup>

Harvey mempertanyakan banyak hal terkait dengan ketimpangan pendapatan ini, salah satunya adalah apa yang menjadikan kesenjangan kekayaan dan pendapatan dapat dibenarkan dan diterima secara etis dan dengan cara apa ketidakadilan dapat dibenarkan. Kepedulian atas pertanyaan di atas telah lama ditanyakan para ilmuwan. Ada sebuah tradisi di kaum reformis borjuis bahwa keberadaan kesengsaraan dan kemiskinan yang amat sangat tidak bisa diterima dalam masyarakat sipil manapun. Lalu mengapa tidak banyak gerakan politik di AS yang ingin memperbaiki distribusi timpang yang terjadi di masyarakat mereka? Jawabannya terletak pada bagaimana pandangan umum seberapa jauh terhadap intervensi negara. Setiap kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah AS, terutama dari 1980 hingga 2008, umumnya berprinsip pada peran pemerintah yang minimal. Sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa kepentingan modal memegang peranan penting, terutama dalam menekan upah buruh dan pajak.

Harvey berpendapat bahwa walaupun tidak ada distribusi pendapatan dan kekayaan unik yang optimal bagi kondisi reproduksi dan pertumbuhan modal, tidak ada seorangpun yang memercayai adanya distribusi pendapatan yang sempurna.<sup>21</sup> Meski demikian kita harus mengakui bahwa distribusi pendapatan yang sangat timpang akan menyebabkan permasalahan, bukan hanya dari sisi ketidakstabilan sosial dan keresahan yang dipicu, tetapi juga sejarah

menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi merupakan pemicu terjadinya krisis ekonomi makro.

Kita melihat bukti saat ini bahwa orang super kaya (*crazy rich*) atau kelas bilioner muncul di berbagai negara dengan jumlah besar, seperti di Rusia, India, Cina, Brasil, Meksiko, dan kini mulai bergeser ke negara Asia lainnya, seperti Indonesia. Branko Milanovic mengatakan bahwa kita saat ini menyaksikan lahirnya plutokrasi global saat kekuasaan global dipegang oleh sejumlah kecil orang yang sangat kaya.<sup>22</sup>

Namun tak dapat dipungkiri juga bahwa dunia saat ini berada dalam kondisi dengan tingkat kemakmuran yang lebih dibandingkan sebelumnya. Jutaan orang sudah mampu keluar dari jerat kemiskinan di bawah sistem kapitalisme. Kalau kita lihat di Cina, sejalan dengan pertumbuhannya yang fenomenal, sejalan juga dengan pertumbuhan di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, dan Indonesia, telah lahir kelas menengah yang jumlahnya signifikan. Ketimpangan kekayaan dan pendapatan dalam distribusi global telah banyak berkurang dengan naiknya pendapatan per kapita di berbagai negara. Disedotnya keuntungan modal dari Timur ke Barat, yang terjadi dalam dua puluh tahun terakhir, kini berbalik dengan masuknya modal dari Barat ke negara-negara Asia. Negara Asia Timur kini bahkan menjadi motor bagi ekonomi global. Namun menurut Harvey, fenomena tersebut menyimpan permasalahan karena sifatnya tidak berkelanjutan atau tidak stabil.<sup>23</sup>

Dalam empat puluh tahun terakhir ada dua pergerakan yang dapat kita cermati. Pertama, terjadinya kecenderungan meningkatnya pendapatan perkapita di berbagai negara. Di sisi lain, terjadi peningkatan yang tinggi juga pada ketidakseimbangan pendapatan atau ketimpangan sosial antara individu dan grup-grup sosial pada hampir semua negara di dunia. Mengapa kecenderungan itu terjadi? Apakah yang terjadi dalam evolusi kontradiksi modal, atau terjadinya perjuangan hidup bagi reproduksi modal? Apakah ketimpangan ini diakibatkan oleh kontradiksi modal yang bergerak? Apakah terjadinya kerusuhan dan ketidakstabilan sosial dikaitkan dengan hal ini? Berbagai pertanyaan ini mengemuka ketika karya Harvey membahas kontradiksi internal modal.<sup>24</sup>

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Harvey mensyaratkan perlunya kita membangun pernyataan bahwa ketimpangan itu merupakan fondasi dasar dari modal. Ketimpangan itu berasal dari kenyataan sederhana bahwa modal secara sosial dan historis dikonstruksi sebagai sebuah dominasi kelas atas kaum buruh. Distribusi pendapatan kekayaan

antara modal dan buruh memang harus tidak seimbang apabila modal ingin terus melakukan produksi dan reproduksi. Keseimbangan distribusi dan modal secara hakikatnya memang tidak kompatibel. Justru terjadinya ketidakseimbangan ini sebenarnya yang mendahului lahirnya kapitalisme.

Meskipun ketimpangan geografis terjadi, kondisi tersebut memberi keuntungan bagi para buruh karena dengan begitu terjadilah penciptaan lapangan kerja di mana-mana. Semakin banyak kapitalis yang melakukan ekspansi, akan semakin banyak lapangan kerja yang dibuka, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dari para buruh. Namun menurut Harvey, cerita itu tidak lengkap. Modal melakukan investasi dan reinvestasi lalu membuka lapangan kerja, hanya bila aktivitas itu menghasilkan keuntungan.<sup>25</sup> Modal hanya bergerak ke kota-kota yang memiliki potensi keuntungan, sehingga pada gilirannya justru menyebabkan ketimpangan antar wilayah karena terdapat daerah-daerah yang tidak menarik bagi modal untuk menetap dan bertumbuh. Tiga resesi terakhir di AS diikuti oleh meningkatnya pengangguran karena tidak ada insentif keuntungan bagi kapitalis meskipun upah saat itu sangat rendah dan jumlah buruh yang membutuhkan pekerjaan banyak jumlahnya. Tetapi modal memilih lebih baik bertahan dalam bentuk kas atau menggunakan kelebihan surplusnya pada aset spekulatif seperti saham, properti, dan instrumen- pasar finansial.

### **Kontradiksi Modal dengan Lingkungan**

Ada pendapat yang mengatakan bahwa kapitalisme menghadapi sebuah kontradiksi yang fatal dalam bentuk menjulangnya krisis dan kerusakan lingkungan hidup yang meluas di berbagai penjuru dunia. Harvey mengakui kebenaran pernyataan tersebut, tetapi menilainya terlalu buru-buru dalam menyimpulkan.<sup>26</sup> Memang benar bahwa sifat modal yang akumulatif dan terus bersirkulasi pada gilirannya akan menyebabkan tekanan pada keseimbangan alam. Sepanjang sejarah, kita melihat bagaimana modal selalu bisa mengatasi masalah kesulitan ekologis. Hal ini dilakukan baik melalui teknologi ataupun inovasi-inovasi modal. Modal memiliki sifat untuk menjaga kesinambungan sirkulasinya, untuk itu ia akan melakukan berbagai cara agar lingkungan dan sistem ekologi tidak sepenuhnya rusak sehingga tak bisa digunakan lagi.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa kapitalisme menyebabkan terjadinya krisis lingkungan, perlu disikapi secara berhati-hati. Di satu sisi memang pendapat tersebut memiliki

dasar logika yang kuat, tetapi di sisi lain juga kontroversial. David Harvey berpandangan bahwa terjadinya beragam permasalahan lingkungan seiring dengan tumbuhnya modal secara eksponensial menjadi dasar pendapat pertama. Namun Harvey meragukan pandangan tersebut dengan empat alasan utama.<sup>27</sup>

Pertama, modal memiliki sejarah panjang yang selalu sukses dalam mengatasi masalah-masalah ekologi yang dihadapinya, tidak peduli apakah hal tersebut merujuk pada penggunaan sumber daya alam, kemampuannya menyerap limbah polusi, atau mengatasi degradasi habitat, hilangnya keanekaragaman alam hayati, maupun menurunnya kualitas udara, air, dan tanah. Kita tentu telah banyak membaca di masa-masa lalu begitu banyaknya ramalan-ramalan tentang kehancuran kehidupan, kiamat peradaban, akibat kapitalisme yang menyebabkan kerusakan dan kelangkaan sumber daya alam. Namun hingga saat ini ramalan itu sebagian besar tidak terbukti sepenuhnya benar. Di tahun 1798 Thomas Malthus pernah memprediksi bencana sosial (meluasnya kelaparan, perang, dan penyakit) sebagai dampak pertumbuhan populasi yang eksponensial dan tidak sebanding dengan pertumbuhan pasokan makanan. Di tahun 1970 Paul Ehrlich, seorang pakar lingkungan, berargumen bahwa kelaparan secara meluas diperkirakan terjadi dalam sepuluh tahun ke depan, tetapi hal itu tidak terbukti.<sup>28</sup>

Kedua, pemaknaan kata “lingkungan” yang selama ini digunakan sebagai objek eksploitasi maupun pemanfaatan oleh modal yang berlebihan sehingga berdampak balik pada kehidupan manusia, terinternalisasi dalam proses akumulasi dan sirkulasi modal. Artinya lingkungan dan modal menyatu dalam prosesnya dan tidak untuk menjadi sebuah dikotomi. Penjelasannya seperti ini, kemampuan sebuah tanaman misalnya saja kelapa sawit, untuk dapat tumbuh berkelanjutan merupakan satu kepentingan yang sama dengan kemampuan modal untuk tumbuh. Oleh karenanya dalam industri agribisnis, pada upayanya memperoleh keuntungan dan reinvestasi kembali keuntungan untuk memperluas usahanya, dan menjaga keberlangsungan tanaman sawit menjadi sebuah prioritas. Ketahanan lingkungan, kesehatan lahan, pupuk, hingga ketersediaan petani dan pekerja, menyatu dalam kepentingan modal mencari keuntungan.

Ketiga, modal telah mengubah alam dan lingkungan menjadi sebuah bisnis raksasa. Teknologi ramah lingkungan saat ini menjadi sebuah tiket bagi perusahaan-perusahaan di negara maju untuk bisa masuk ke bursa saham. Lingkungan, sebagaimana dikatakan Neil Smith, telah menjadi sebuah strategi akumulasi. Ketika penggunaan teknologi memberi

dampak pada lingkungan, langkah selanjutnya adalah menciptakan teknologi baru untuk mengatasi dampak tersebut ataupun mencari pengguna yang bisa memanfaatkan investasi yang telah dikeluarkan. Hal ini pada gilirannya menuntut sebuah kemampuan untuk kreatif dan menciptakan kreasi ketimbang memuaskan kebutuhan konsumen. Obat baru diciptakan untuk mengobati satu penyakit lalu mengakibatkan efek samping, dan diciptakan lagi obat untuk mengatasi efek samping tersebut. Hal ini berlangsung terus menerus.

Demi keuntungan, modal akan menangkap dialektika tentang bagaimana kita dapat mengubah diri kita sendiri dengan mengubah dunia (dan sebaliknya). Semua proyek ekologi dan lingkungan adalah proyek sosial ekonomi (dan sebaliknya). Segala hal yang bergantung pada tujuan sosial ekonomi dan proyek ekologi, dihadapkan pada pertanyaan: apakah proyek ini ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat atau pencapaian tingkat keuntungan? Tentu saja di beberapa proyek kemanusiaan, seperti air bersih dan kesehatan masyarakat, dialektika ini bekerja pada keuntungan masyarakat luas, kadang bahkan mengorbankan keuntungan. Dukungan yang populer bagi bisnis-bisnis besar harus menyeimbangkan konsekuensi untuk memberi keuntungan pada modal dan lingkungan secara politik. Namun kita dapat melihat dari sisi politik, kadang hal ini lebih terlihat simbolik ketimbang substantif. Hal ini yang disebut oleh Harvey dengan istilah “*greenwashing*” atau menutupi proyek yang keuntungannya besar sebagai proyek yang terlihat peduli dan mendukung kemanusiaan. Proposal Al Gore mengenai gerakan lingkungan untuk peduli pada pemanasan global dimanfaatkan negara-negara maju untuk menciptakan pasar baru perdagangan emisi karbon, yang kemudian menjadi ajang spekulasi dan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan finansial ketimbang mengurangi emisi karbon sebagaimana cita-cita awalnya.

Keempat, yang menurut Harvey adalah hal yang paling tidak nyaman untuk dibicarakan adalah bahwa modal sangatlah mungkin untuk tetap memperoleh keuntungan dan bersirkulasi dalam kondisi bencana dan kerusakan alam sekalipun. Bencana alam menciptakan banyak peluang bagi “kapitalisme bencana” untuk memperoleh keuntungan yang berlimpah. Kematian akibat kelaparan dan kerusakan habitat lingkungan tidak serta merta menyebabkan kesulitan bagi modal (kecuali kemudian terjadi perang atau kekacauan yang merusak segalanya) karena pada dasarnya banyak populasi di dunia ini yang bagi modal sudah digolongkan pada orang yang terpinggirkan dan tidak dapat dimanfaatkan bagi keuntungan. Dan modal tidak pernah mengecil atau berhenti untuk meraih keuntungan di atas berbagai permasalahan kemanusiaan sekalipun.

Meskipun hubungan modal dengan lingkungan dapat saling menyesuaikan sepanjang sejarah, pertanyaan yang diajukan Harvey adalah, bagaimana hubungan antara modal dan lingkungan tersebut menjadi berbahaya, atau fatal bagi reproduksi modal? Dalam perjalanannya, terutama sejak beberapa puluh tahun terakhir, modal tidak bisa menjaga kesatuan dirinya dengan alam sebagai sebuah harmoni yang berkelanjutan. Hal ini karena bagi modal, alam pada ujungnya adalah sebuah obyek bagi produksi. Alam adalah sebuah nilai guna potensial yang dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung untuk realisasi komoditas.

Hal yang kemudian menjadi berbahaya adalah apabila modal mulai menguasai kepemilikan umum dan hal terkait dengan kebutuhan lahan untuk publik, seperti energi, makanan, dan sumber daya lainnya.<sup>29</sup> Terjadinya kenaikan harga makanan yang menyebabkan kerusuhan di berbagai negara sebagian besar dapat dikaitkan pada bagaimana nilai guna dan nilai tukar dimanfaatkan, atau dimanipulasi sedemikian rupa untuk alasan mencari keuntungan. Para ekonom sendiri sebenarnya menyadari adanya permasalahan kegagalan pasar akibat kontradiksi internal yang berbahaya ini, bahkan terkadang hal ini terjadi akibat intervensi negara yang tidak tepat.

Harvey menyimpulkan betapa berbahayanya kepemilikan modal terhadap lingkungan yang tidak disertai rasa tanggung jawab.<sup>30</sup> Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah meningkatnya kekuatan kelas investor (khususnya properti atau investasi finansial) untuk mendapatkan kekayaan dan pendapatan tanpa harus susah payah melakukan produksi. Kepemilikan dan komodifikasi tanah atau hutan serta kelangkaan alam memungkinkan lahan tidur untuk diekstraksi hasilnya dan ia mengambil persentase keuntungan darinya.

Dari pemaparan di atas setidaknya Harvey mencatat dua hal.<sup>31</sup> Pertama, betapa pentingnya modal merangkul dan membangun payung kepedulian alam dan lingkungan sebagai fondasi legitimasi bagi bisnis besar lingkungan hidup di masa depan. Dengan dibangunnya payung “kepedulian lingkungan”, modal dapat mengarahkan diskursus-diskursus ekologi, mendefinisikan alam dan lingkungan dalam pengertiannya sendiri, dan mampu mengelola modal - termasuk kontradiksinya ke dalam kepentingan kelasnya sendiri. Kedua, semakin dominan mesin ekonomi modal berada dalam formasi sosial yang membentuk kapitalisme, semakin peraturan yang berhubungan dengan metabolisme alam dan modal mendominasi diskursus publik, politik, dan kebijakan.

Harvey mengindikasikan terjadinya degradasi pada kualitas ekosistem modal. Kebanyakan hal tersebut dikaitkan dengan pesatnya urbanisasi dan konstruksi kota-kota baru (yang kerap disebut Harvey dengan istilah “*second nature*” atau alam kedua) yang memiliki kualitas rendah.<sup>32</sup> Pertarungan modal untuk berjuang memperbaiki kondisi ekologi terus menerus berlangsung dan semakin tajam. Efek ekologis umumnya dirasakan oleh perusahaan kapitalis dalam bentuk biaya lainnya atau oleh para ekonom biasa disebut ‘eksternalitas’, yang didefinisikan sebagai biaya-biaya yang timbul sebagai akibat operasional perusahaan tetapi tidak perlu dibayar (seperti polusi atau limbah yang dibuang ke udara atau air).

### **Penutup: Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara**

Bagi kita di Indonesia, pemikiran Harvey semakin relevan untuk dipikirkan karena realita kinerja kapitalisme di dunia global sejak 1980-an, termasuk di Indonesia yang terus menerus melampaui ruang-ruang geografis. Pembangunan kota-kota di berbagai wilayah Indonesia terus bertumbuh menarik modal dari berbagai investor, baik lokal maupun dari luar. Akibatnya, arus modal dapat masuk ataupun keluar Indonesia, menyebar ke berbagai wilayah, baik melalui pasar finansial hingga pembukaan ruang-ruang perkotaan baru yang memiliki risiko untuk merambah ke pembukaan hutan atau perusakan lingkungan. Sebagai negara berkembang yang masih membutuhkan modal untuk bersirkulasi dan memberi keuntungan, kita masih membutuhkan modal asing sehingga sistem seperti ini tentu saja memberikan manfaat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kita juga perlu memahami bahwa secara inheren terdapat kontradiksi internal yang dikandung modal. Permasalahan etis yang mengemuka terletak pada meningkatnya ketimpangan dan jumlah orang yang harus menjadi korban dari sebuah pembangunan. Siapa yang menikmati hasil pembangunan dan siapa yang menjadi korban adalah sebuah masalah etis yang perlu dipikirkan dari sebuah kebijakan publik. Para ilmuwan ataupun pengambil kebijakan umumnya mencoba mencari jawaban paling praktis atau pragmatis terhadap permasalahan kemasyarakatan yang muncul. Berbagai opsi kebijakan publik misalnya, diputuskan dan dilakukan setelah melihat pada apa yang faktual dan menjadi problema dalam masyarakat suatu wilayah atau negara.

Tulisan ini mencoba mengusulkan pentingnya memasukkan momen etis di antara momen pencarian jawaban (secara ilmiah) terhadap problema ekonomi dan momen pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah. David Harvey sendiri terlihat mengalami kesulitan ketika harus mencari jawaban atas permasalahan etis yang tersemat dalam kontradiksi internal modal pada kapitalisme. Harvey meyakini bahwa kemampuan kapitalisme untuk dapat bertahan hidup hingga sekarang bukanlah tanpa biaya dan korban. Modal bisa bertahan dan melakukan segala hal hingga saat ini disebabkan oleh kekuasaan kelas-kelas yang memiliki kekuasaan sehingga bisa terus menerus menggerakkan sirkulasi modal menjadi semakin besar, berlipat ganda, dan merambah berbagai wilayah geografis. Isu yang disampaikan oleh Harvey pada kontradiksi ini bukanlah perkara apakah modal dapat bertahan hidup ke depan, tetapi biaya dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk mempertahankan pola seperti saat ini sudah keterlaluhan dan tak dapat diterima lagi oleh sebagian besar penduduk dunia.<sup>33</sup>

Berbagai keresahan, kerusakan, ketimpangan sosial, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kelaparan di berbagai wilayah, hingga bencana alam, banjir, tanah longsor, saat ini tak bisa dipisahkan lagi dari peran modal, khususnya tegangan antara kaum miskin dengan kapitalis yang memiliki kekuasaan. Menghadapi berbagai hal di atas, kekhawatiran Harvey adalah meletupnya kerusakan dan gejolak di berbagai negara. Namun, Harvey juga tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan tentang apa yang harus dilakukan. Ia hanya mengatakan bahwa sistem kapitalisme yang ada saat ini harus dihentikan, sebagaimana disampaikan sendiri oleh Harvey dalam *Enigma of Capital*:

Kapitalisme tidak akan pernah jatuh sendiri. Ia harus kita dorong beramai-ramai. Akumulasi modal juga tidak akan pernah mereda atau berhenti dengan sendirinya. Ia harus dihentikan. Kelas kapitalis tidak akan pernah secara sukarela menyerahkan kekuasaannya. Ia harus direbut.<sup>34</sup>

Harvey hingga saat ini masih meyakini pemikirannya itu. Jelas bahwa langkah yang diusulkan oleh Harvey membutuhkan gerakan politik yang kuat dan komitmen bersama-sama para individu. Namun visi seperti apa yang bisa menggerakkan perubahan itu? Dan mungkinkah itu terjadi? Di sini Harvey tidak dapat memberikan jawaban memuaskan.

Dalam artikel ini, penulis mencoba mengangkat bahwa permasalahan yang muncul dari pembentukan kota-kota baru menurut Harvey, perlu menjadi perhatian kita, khususnya dalam



pembentukan IKN di Kalimantan Timur. Namun penulis juga melihat bahwa Harvey mengalami kebuntuan untuk mencari solusi konkrit. Hal ini karena Harvey ingin mematok penyelesaian etis normatif dalam kerangka ruang-waktu yang bergerak. Penulis berpandangan bahwa upaya memasukkan pertimbangan etis dalam konsep produksi dan distribusi, termasuk dalam pembangunan ekonomi memang tidak mudah, tetapi harus menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Kebijakan publik selalu dimulai dari apa yang faktual dan menjadi masalah dalam masyarakat. Bertumpunya pembangunan di Pulau Jawa, dan perlunya melakukan pemerataan pembangunan ke wilayah lain adalah sebuah fakta ilmiah yang dapat dibuktikan. Pada tataran ini, momen ilmiah didasari oleh kekuatan ilmu pengetahuan rasional yang didukung data. Hal ini penting untuk mencari cara-cara membangun atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari momen ilmiah tersebut, para pengambil kebijakan perlu memilih sebuah momen kebijakan (*policy*) yang dalam implementasinya menuntut kepemimpinan untuk memilih opsi-opsi kebijakan publik.

Kita perlu menyematkan momen etis (pemikiran filsafat) di antara kedua momen di atas. Dari pemaparan Harvey yang mengangkat soal sifat dasar modal pada kapitalisme yang dapat berakumulasi semakin berbahaya, kita perlu mencermati dan berhati-hati pada dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari pemindahan IKN. Pembangunan IKN dalam konteks spasial Harvey dapat dilihat sebagai sebuah proses pergerakan akumulasi modal ke wilayah-wilayah yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan. Sungai sejarah menunjukkan, sebagaimana dijelaskan dari argumen Harvey di atas, bahwa penyerapan akumulasi modal dan urbanisasi pada gilirannya dapat menimbulkan persoalan ketimpangan dan lingkungan. Artikel ini ingin mengajak kita untuk melihat hal-hal di balik berbagai analisis mengenai produksi atau pertumbuhan ekonomi.

Umumnya para ekonom dalam merancang pembangunan ekonomi mengacu pada pencapaian angka-angka indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja, maupun rasio pajak. Alasan utamanya adalah sulitnya mendefinisikan dan mempersempit problema etis dari sudut pandang ekonomi. Aspek etis akan sangat bergantung pada lokasi, budaya, dan etika setempat, sehingga perlu didefinisikan secara tegas sesuai dengan letak geografis yang berbeda. Akhirnya momen ini kerap dilewatkan dan ditinggirkan dalam analisis, termasuk pada pembentukan kota-kota baru. Ketimpangan sosial muncul dan terdapat di berbagai lokasi atau budaya, yang pada gilirannya nanti justru menyebabkan

disrupsi pada keberlanjutan kinerja kapitalisme yang merugikan semua pihak karena bisa datang kembali dalam bentuk krisis.

Rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur dalam praktiknya akan mengakibatkan pembukaan ruang kota baru dan urbanisasi yang melibatkan modal dalam jumlah besar. Arus modal akan mengalir ke kota baru tersebut. Tentu tujuan untuk memindahkan ibu kota tersebut salah satunya adalah untuk melakukan pemerataan pembangunan agar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kota baru yang dibangun juga memiliki potensi menyebabkan perubahan lingkungan, termasuk menimbulkan ketimpangan pendapatan, terutama pada wilayah sekitar kota tersebut. Modal akan mengalir deras ke pembangunan kota baru, dan menghasilkan berbagai bangunan dan gedung tinggi. Perlu dipertimbangkan pula dampak etisnya pada lingkungan, hutan lindung, dan kelestarian satwa.

Penulis berpendapat bahwa pendekatan etis tetap perlu dimasukkan dalam berbagai kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat, *civil society*, penduduk lokal, dan berbagai pihak terkait, perlu semakin ditingkatkan. Penulis mengacu pada konsep pendekatan Karl Polanyi tentang gerakan-balik sebagai titik awal pemberontakan etis atas kinerja kapitalisme dalam pandangan Harvey. Polanyi berpendapat bahwa masyarakat pasar terdiri dari dua gerakan yang berlawanan, gerakan *laissez-faire* yang mengembangkan cakupan pasar dan gerakan balik perlindungan diri yang muncul untuk menolak ketercerabutan ekonomi.<sup>35</sup> Gerakan balik perlindungan diri harus terjadi untuk mencegah bencana ketercerabutan ekonomi.

Gerakan balik perlindungan diri dapat dibangun dari upaya dialog antara pelaku pasar, masyarakat lokal, dan pemerintah untuk bersama-sama mengatasi problema etis dari pembangunan IKN. Kita tidak dapat mengatasi masalah etis secara permanen, dengan mematok pilihan pada satu solusi, melainkan para pengambil kebijakan, termasuk masyarakat, perlu mencari titik optimum untuk menyeimbangkan kepentingan bersama. Tanpa adanya kesadaran etis dalam pembangunan IKN, maka terdapat risiko kita terayun kembali pada krisis atau masalah-masalah sosial, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan di masa depan.

---

<sup>1</sup> B. Herry-Priyono, *Kota dan Harta*. Rangkaian Studium Generale Seri ke-5, Goethe-Institute dan STF Driyarkara, Jakarta, 15 Oktober 2009

<sup>2</sup> Mike Douglas, *Civil Society for Itself*, 2003, hlm 12

<sup>3</sup> Bank Indonesia, *Laporan Nusantara*, edisi April 2021, hal 3-4

<sup>4</sup> Harian Kompas, 5 April 2021, hlm 1

- 
- <sup>5</sup> David Harvey, *Marx, Capital and The Madness of Economic Reason*, London: Profile Books Ltd, 2017, hlm1
  - <sup>6</sup> David Harvey, *A Companion to Marx's Capital*, London: Verso, 2010, hlm 9
  - <sup>7</sup> David Harvey, *The Enigma of Capital*, London: Profile Books Ltd, 2009, hlm 2  
146
  - <sup>9</sup> David Harvey, *The Enigma of Capital*, hlm 159
  - <sup>10</sup> David Harvey, *The Enigma of Capital*, hlm 167-169
  - <sup>11</sup> David Harvey, *Rebel Cities: From Right to The City to The Urban Revolution*, London: Verso, 2012, hlm 16
  - <sup>12</sup> David Harvey, *Limits to Capital*, London: Verso, 2006 / [1982], hlm 415
  - <sup>13</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 146
  - <sup>14</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 146
  - <sup>15</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 147
  - <sup>16</sup> David Harvey, *Limits to Capital*, hlm 415
  - <sup>17</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 150, bandingkan dengan Gunnar Myrdal, *Economic Theory and Underdeveloped Regions*, London, Duckworth, 1957
  - <sup>18</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 164
  - <sup>19</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 165
  - <sup>20</sup> John L. Paterson, *David Harvey's Geography RLE Social & Cultural Geography*, Routledge, 2014, hlm 67
  - <sup>21</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 169
  - <sup>22</sup> Branko Milavonic, *Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality*, (Princeton, Princeton University Press, 2005), hlm 149
  - <sup>23</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 170
  - <sup>24</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 171
  - <sup>25</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 172
  - <sup>26</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 246
  - <sup>27</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 247
  - <sup>28</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 248, bandingkan dengan Paul Sabin, *The Bet: Paul Ehrlich, Julia Simon, and Our Gamble over Earth's Future* (New Haven: Yale University Press, 2013)
  - <sup>29</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 250
  - <sup>30</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 262
  - <sup>31</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 252
  - <sup>32</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 254
  - <sup>33</sup> David Harvey, *Seventeen Contradictions and The End of Capitalism*, hlm 264
  - <sup>34</sup> "Capitalism will never fall on its own. It will have to be pushed. The accumulation of capital will never cease. It will have to be stopped. The capitalist class will never willingly surrender its power. It will have to be dispossessed", David Harvey, *The Enigma of Capital*, hlm 260
  - <sup>35</sup> Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economics Origin of Our Time*, Boston, Beacon Press, 1957, hlm 256-7

## DAFTAR PUSTAKA

Harvey, David, *Explanation in Geography*. London: Hodder & Stoughton Educational, 1969  
 ———, *Globalization in question*, Sweden, Development Research Unit, Department of Development and Planning, Aalborg Univ, pp 4:1-17, 1979

- 
- \_\_\_\_\_, *The Urban Experience*. Baltimore: John Hopkins University Press, 1985
- \_\_\_\_\_, *Justice, Nature, & the Geography of Difference*. Oxford: Blackwell, 1996
- \_\_\_\_\_, “*The Humboldt Connection*”, *Annals of the Association of American Geographers* 88, 1998
- \_\_\_\_\_, *Spaces of Hope*. Edinburgh: Edinburgh University Press and Berkeley, CA: University of California Press, 2000
- \_\_\_\_\_, *The Spaces of Utopia*, in D. Goldberg, M. Mushenyo, and L. Bower (eds) *Between Law and Culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp 95 – 12, 2001
- \_\_\_\_\_, *Spaces of Capital : Towards a Critical Geography*. Edinburgh: Edinburgh University Press and New York : Routledge, 2001
- \_\_\_\_\_, *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press, 2003
- \_\_\_\_\_, *Paris, Capital of Modernity*, New York: Routledge, 2003
- \_\_\_\_\_, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford: Oxford University Press, 2005
- \_\_\_\_\_, *Limits to Capital*, London: Verso, 2006
- \_\_\_\_\_, *Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom*, New York: Columbia University Press, 2006
- \_\_\_\_\_, *Social Justice and the City (Revised Edition)*. Georgia: The University of Georgia Press, 2009 / [1973]
- \_\_\_\_\_, *The Enigma of Capital*, London: Profile Books Ltd, 2010
- \_\_\_\_\_, *A Companion to Marx’s Capital Volume 1*, London: Verso Books, 2010
- \_\_\_\_\_, *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*, London: Verso Books, 2013
- \_\_\_\_\_, *A Companion to Marx’s Capital Volume 2*, London: Verso Books, 2013
- \_\_\_\_\_, *Seventeen Contradictions and the End of Capitalism*, London: Profile Books, 2014
- \_\_\_\_\_, *The Ways of the World*, Oxford University Press, 2016
- \_\_\_\_\_, *Marx, Capital and the Madness of Economic Reason*, London: Profile Books, 2017
- Marx, Karl, and Engels, Frederick, *Economic and Philosophic Manuscript of 1844 (translated by Martin Miligan)*, Start Publishing LLC, 2012 [1844]
- Marx, Karl, and Engels, Frederick, *The Communist Manifesto*. Internacional Publishers Co; New Edition, 2014 [1848].
- Marx, K, *Capital: A Critique of Political Economy Vol 1*, F. Engels (ed.), S. Moore and E. Aveling (trans.), London: Lawrence and Wishart, 1954 [1886]
- Piketty, Thomas, *Capital and Ideology*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2020
- Piketty, Thomas, *The Economics of Inequality*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2015 / [1997]
- Polanyi, Karl, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, Boston, Beacon Press, 1957
- Polanyi, Karl, *Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi*, New York: Double Day Company Ltd, 1968
- Smith, Neil, *Nature as Accumulation Strategy*, Socialist Register, 2007